



FRAMING PEMBERITAAN MEDIA ONLINE KOMPAS.COM TERKAIT ISU PERTAMBANGAN DI RAJA AMPAT

Ariel Kevin Amerish¹, Teguh Hartono Patriantoro²

Abstrak

Penelitian memiliki tujuan untuk mengkaji *Kompas.com* dalam membingkai berita isu pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat, dengan menggunakan Kajian memanfaatkan model framing Robert N. Entman. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan bertumpu pada teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, dan didukung oleh konsep agenda setting dari McCombs dan Shaw Data diperoleh dari lima artikel berita *Kompas.com* yang terbit pada periode 1–15 Juni 2025. Hasil penelitian *Kompas.com* membingkai aktivitas pertambangan di Raja Ampat sebagai krisis lingkungan dan ancaman bagi masyarakat adat dibandingkan sebagai peluang ekonomi. Media Kompas memberi perhatian besar pada isu pelestarian lingkungan, perlindungan hak-hak masyarakat adat, dan tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan aturan terkait ekologi. *Kompas.com* membentuk pemberitaan yang condong pada kepentingan lingkungan, dengan menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan prinsip keadilan ekologis

Kata Kunci: Analisis framing, Kompas.com, Pertambangan, Raja Ampat.

Abstract

This study aims to analyze how Kompas.com frames news coverage of mining issues in Raja Ampat, West Papua, using Robert N. Entman's framing analysis model. The research adopts a qualitative descriptive approach with the social construction of reality theory by Berger and Luckmann and the agenda-setting theory by McCombs and Shaw as supporting frameworks. Data collected from five news articles published on Kompas.com between 1-15 June 2025. The results indicate that Kompas.com tends to frame mining activities in Raja Ampat as an environmental crisis and a threat to indigenous communities rather than as an economic opportunity. The media emphasizes ecological preservation, the rights of local communities, and the government's role in enforcing environmental regulations. Overall, Kompas.com constructs a pro-environmental narrative that supports sustainable development and justice for local communities.

Keywords: framing analysis, Kompas.com, Mining, Raja Ampat

¹ Universitas Dian Nuswantoro, Email : 115202001949@mhs.dinus.ac.id

² Universitas Dian Nuswantoro, Email : teguhhp@dsn.dinus.ac.id

PENDAHULUAN

Isu pertambangan di Raja Ampat tidak hanya berdampak ekologis, tapi juga menjadi sorotan media nasional karena mencerminkan tarik-menarik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan keadilan lingkungan. Raja Ampat bukan hanya wilayah konservasi milik Papua Barat Daya, melainkan bagian dari kekayaan ekologis dunia yang memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan ekosistem laut global. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan berpotensi memengaruhi sektor pariwisata, perikanan, dan kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada kelestarian alam. Pemberitaan media terhadap isu ini menjadi penting karena dapat membentuk opini publik serta memengaruhi arah kebijakan pemerintah terhadap perlindungan lingkungan dan masyarakat adat. Penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji dinamika pertambangan di Raja Ampat. Atong (2025) menyoroti dilema antara pembangunan ekonomi dan pariwisata berkelanjutan dari perspektif sosial-politik, selain itu Sani dan Syamsuddin (2025) memfokuskan kajian pada etika lingkungan dan rekayasa konservasi pertambangan nikellaporan dari organisasi sipil seperti Greenpeace (2023) dan JATAM secara konsisten mengungkap data kerusakan ekologis di lapangan. Peran media sangat krusial karena penonjolan aspek tertentu dalam berita dapat mengarahkan sentimen publik dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah (research gap) dengan menggunakan analisis framing model Robert N. Entman untuk membongkar bagaimana *Kompas.com* menyusun narasi, menentukan aktor penyebab, hingga menawarkan solusi atas isu pertambangan di Raja Ampat pada periode Juni 2025." Pembingkaiian yang dilakukan oleh *Kompas.com* tidak sekadar menyajikan teks berita fungsional, melainkan sebuah bentuk kontestasi ideologi di ruang publik. Upaya dekonstruksi wacana dominan di mana istilah 'pembangunan ekonomi' dan 'energi hijau' yang dibawa oleh aktor korporasi dan pemerintah ditandingi oleh wacana 'keadilan ekologis' dan 'hak ulayat' yang disuarakan oleh masyarakat adat. Pilihan bahasa dan penonjolan tradisi lokal seperti *sasi* oleh *Kompas.com* mempertegas posisi ideologis media yang menolak hegemoni kapitalisme ekstraktif di wilayah konservasi melalui struktur framing Entman yang dihadirkan, *Kompas.com* secara kritis menjalankan fungsi *social control* dan fungsi advokasi guna mengimbangi ketimpangan relasi kuasa yang terjadi dalam konflik agraria di Raja Ampat.

Raja Ampat di Papua Barat dikenal sebagai wilayah dengan kekayaan hayati laut yang sangat tinggi, dan ditetapkan resmi UNESCO Global Geopark pada Mei 2023 karena kekayaan ekologi serta geologi yang unik (Tempo.com, 2025). Namun, di balik pesonanya, wilayah Raja Ampat tengah terancam karena adanya aktivitas pertambangan yang berdampak signifikan terhadap kondisi lingkungan di pulau-pulau kecil seperti Manuran, Kawe dan Gag yang membuat kerusakan lingkungan serta konflik antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat (Kompasiana, 2025). Laporan Greenpeace (2023) menunjukkan akibat operasi pertambangan, lebih dari 500 hektare hutan mengalami kerusakan, sehingga meningkatkan sedimentasi berpotensi merusak ekosistem laut.. Isu pertambangan di Raja Ampat tidak

hanya berdampak ekologis, tetapi juga menjadi sorotan media nasional karena mencerminkan tarik-menarik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan keadilan lingkungan. Teknologi berkembang seiring dengan perkembangan kecerdasan manusia, termasuk teknologi konvensional yang kini mulai memasuki ranah digital (Albab et al., 2022) salah satunya media *online*, termasuk *Kompas.com* berpengaruh dalam membentuk bagaimana publik memahami isu dan meringkaskan informasi. (Entman, 1993).

Kompas.com dikenal sebagai media *online* dengan akses terbesar dan paling aktif memberitakan isu selama Juni 2025 (GoodStats, 2024). Penelitian penting karena media memiliki kekuatan dalam mengonstruksi realitas sosial dan membentuk opini publik mengenai konflik lingkungan. Dengan menggunakan perspektif konstruksi sosial realitas yang diperkenalkan Berger dan Luckmann (1966) serta teori agenda setting dari McCombs dan Shaw, penelitian menganalisis *Kompas.com* meringkaskan isu pertambangan di Raja Ampat. Permasalahan lingkungan di Raja Ampat semakin kompleks seiring meningkatnya ekspansi pertambangan nikel yang beroperasi di pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi ekologis penting. Aktivitas memicu degradasi kawasan hutan, meningkatkan sedimentasi, dan mengancam keseimbangan ekosistem laut yang menjadi ciri khas wilayah tersebut. Laporan Greenpeace (2023) mengungkapkan bahwa kerusakan hutan akibat tambang telah melampaui 500 hektare, menyebabkan kualitas perairan menurun dan berdampak pada keberlangsungan biota laut. Konflik yang muncul bukan hanya terkait kerusakan alam juga menyangkut hak-hak masyarakat adat yang merasa ruang hidupnya terampas serta lemahnya pengawasan pemerintah terhadap izin operasional tambang. Situasi memperlihatkan bahwa persoalan pertambangan di Raja Ampat tidak dapat dipahami hanya dalam konteks ekonomi, melainkan berkaitan dengan persoalan struktural mengenai tata kelola sumber daya, keadilan ekologis, dan benturan kepentingan antar aktor yang terlibat.

Pertambangan nikel di beberapa pulau Raja Ampat memperlihatkan kebijakan pemanfaatan ruang yang tidak selaras dengan prinsip konservasi dapat menimbulkan kerentanan ekologis yang tinggi. Pulau kecil memiliki daya dukung yang terbatas sehingga tekanan aktivitas industri lebih cepat menimbulkan kerusakan yang sulit dipulihkan. Aktivitas pertambangan dilakukan tanpa mempertimbangkan karakteristik ekologis tersebut, dampaknya langsung terlihat kualitas tanah, air, dan keseimbangan ekosistem pesisir. Situasi inilah yang memicu kekhawatiran berbagai pihak terkait keberlanjutan kawasan Raja Ampat sebagai wilayah strategis konservasi laut dunia.

Persoalan pertambangan berkaitan dengan dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat adat. Mereka memiliki budaya dan sistem adat yang sejak lama menjaga keseimbangan alam, sehingga keberadaan tambang dipandang mengganggu harmoni. Ketegangan muncul ketika hak-hak masyarakat adat dalam mengelola tanah ulayat tidak sepenuhnya diakomodasi, sementara kegiatan industri terus berjalan. Ketidaksielarasan ini memperlihatkan adanya persoalan struktural dalam tata kelola

sumber daya yang seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat lokal dan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional.

Ancaman terhadap kawasan Raja Ampat muncul melalui adanya ekspansi industri, terkhusus pertambangan nikel dan emas terlebih setelah mendapatkan izin dari pemerintah. Pertambangan terjadi di pulau seperti Manuran, Kawe, Gag, hal itu menjadi konflik perdebatan antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan tambang (Kompasiana, 2025). Pemberian izin memicu penolakan masyarakat adat yang dilakukan tanpa sepengetahuan mereka dan berpotensi merusak ekosistem lingkungan. Dalam ranah ilmu komunikasi, pbingkai isu masalah oleh peran media sangat krusial, sebab media dapat membentuk bagaimana suatu peristiwa dipahami dan memengaruhi cara masyarakat melihatnya. (Eriyanto, 2018). Media tidak hanya memberitakan fakta, tetapi juga memutuskan sisi mana dari peristiwa yang ingin mereka soroti. dan aspek yang ditonjolkan untuk dilihat audiens sehingga terdapat nilai moral dari peristiwa yang terjadi.

Penelitian dapat dijadikan contoh dalam proses belajar, terutama mata kuliah yang membahas literasi media dan analisis teks (Mulyana, 2023). Mempelajari sebuah isu dibingkai, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis tidak sekedar menerima informasi dari media, tetapi mampu menilai bagaimana pesan disusun dan dampaknya bagi pembentukan opini publik (Syahputra, 2022) Konflik antara upaya konservasi lingkungan yang ketat dan potensi eksploitasi sumber daya mineral di Raja Ampat, kawasan yang diakui dunia karena keanekaragaman hayati lautnya. Di sisi lain, muncul narasi tentang potensi ekonomi dari sumber daya mineral untuk pembangunan. Media online *Kompas.com* memainkan peran sentral sebagai portal besar di Indonesia, *Kompas.com* tidak hanya melaporkan, tetapi juga membingkai (frame) isu pertambangan di Raja Ampat. Urgensi penelitian yaitu konflik isu lingkungan kelestarian laut di Raja Ampat dan pertambangan nikel untuk pembangunan ekonomi, Kompas memiliki posisi strategis sebagai media yang mampu membentuk opini publik serta mengarahkan perhatian masyarakat pada isu tertentu, memberikan kesadaran masyarakat terkait isu tersebut (kontruksi sosial) . Penelitian cukup penting untuk melihat sejauh mana media *Kompas.com* berpihak pada prinsip keadilan ekologis dan masyarakat adat. Ketika media membingkai hanya secara sepihak maka publik kehilangan kebenaran dari isu yang terjadi, dengan demikian, studi ini menjadi penting untuk mengkaji pemberitaan apa yang ditonjolkan, siapa yang diberi ruang untuk berbicara, serta narasi mana yang dibuat lebih dominan.

METODE

Penentuan sampel data dalam penelitian dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan menetapkan kriteria inklusi yang ketat guna memastikan relevansi data dengan pendekatan framing dan analisis wacana kritis. Karakteristik data yang dipilih dibatasi secara kronologis pada teks berita utuh (*hard news* atau *features*) yang dipublikasikan secara resmi oleh portal media online *Kompas.com* dalam

rentang waktu spesifik 1–15 Juni 2025, yang merupakan fase eskalasi utama (*peak season*) pemberitaan pasca-mencuatnya konflik industri ekstraktif di wilayah konservasi tersebut. Secara tematik, data harus memiliki karakteristik muatan wacana yang kuat mengenai benturan regulasi (UU No. 1/2014) dan dampak kerusakan lingkungan nyata—seperti yang terjadi di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran akibat aktivitas pertambangan nikel—yang kemudian dipertandingkan secara dikotomis dengan narasi industri energi hijau dan kebijakan hilirisasi nasional. Selain itu, demi mendukung pisau analisis wacana kritis, teks berita wajib memenuhi karakteristik representasi aktor yang seimbang dengan memuat pernyataan atau argumen dari pihak-pihak yang terlibat dalam ketimpangan relasi kuasa, mencakup aktor dominan atau hegemonik (Pemerintah dan Korporasi) serta aktor resisten atau marginal (Masyarakat Adat Raja Ampat dan Kementerian Lingkungan Hidup). Terakhir, secara struktural dan tekstual, lima artikel berita yang berhasil dijaring sebagai unit analisis harus memiliki narasi evaluatif yang komprehensif agar dapat dioperasionalkan secara utuh ke dalam empat perangkat matriks framing Robert N. Entman, yang meliputi elemen pendefinisian masalah (*define problems*), perkiraan penyebab (*diagnose causes*), penilaian moral (*moral judgement*), hingga penawaran solusi konkret (*treatment recommendation*) berbasis kearifan lokal *sasi* maupun peralihan ke sektor ekowisata.

Metode kualitatif deskriptif diterapkan untuk menelaah dan memahami Kompas.com membingkai isu pertambangan di Raja Ampat. Pendekatan digunakan untuk menggambarkan makna dan konstruksi realitas sosial yang dibangun media melalui bahasa dan narasi pemberitaan (Moleong, 2017). Analisis dilakukan dengan mengacu pada model framing Robert N. Entman (1993), empat pilar analisis: perumusan masalah, penentuan faktor penyebab, pemberian penilaian moral, dan pengajuan solusi. Objek penelitian meliputi lima artikel berita Kompas.com yang terbit pada 1–15 Juni 2025, dipilih karena secara langsung membahas aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Data diperoleh melalui metode dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola pembingkai media. Hasilnya diinterpretasikan dengan teori konstruksi sosial atas realitas (Berger & Luckmann, 1966) dan agenda setting (McCombs & Shaw, 1972) guna memahami bagaimana media menempatkan isu lingkungan dalam perhatian publik.

Penggunaan model framing Entman dalam penelitian bertujuan mengurai struktur pesan yang dibangun media melalui empat perangkat utama, sehingga terlihat bagaimana realitas pertambangan dikonstruksi dalam wacana publik (Entman, 1993). Setiap elemen dianalisis secara sistematis, dimulai dari media mendefinisikan isu sebagai masalah, kemudian menelusuri unsur yang dianggap sebagai penyebab terjadinya masalah. Tahapan sejalan dengan pandangan Eriyanto (2012) framing bekerja lewat proses pemilahan isu dan pemberian fokus pada aspek tertentu yang dianggap relevan. dalam teks media. Penelitian menelaah nilai moral yang disisipkan melalui kata, pandangan, narasi yang menonjolkan maupun menyembunyikan aspek tertentu, sebagaimana dijelaskan Sobur (2009) bahwa bahasa menjadi

alat utama dalam konstruksi makna media. Tahap terakhir berfokus pada rekomendasi solusi yang ditawarkan media, baik secara eksplisit maupun implisit, untuk melihat kecenderungan posisi media terhadap isu lingkungan tersebut. Proses analisis memungkinkan peneliti menangkap pola konsisten dalam konstruksi makna yang dibangun Kompas.com, serta memahami arah ideologis pemberitaan melalui struktur framing yang muncul dari setiap artikel berita, selaras dengan pemikiran Shoemaker dan Reese (2014) mengenai pengaruh ideologi dalam produksi isi media

PEMBAHASAN

Penelitian menganalisis bagaimana Kompas.com membingkai isu pertambangan di Raja Ampat mengacu pada konsep framing milik Robert N. Entman. Framing dalam konteks ini bukan hanya cara media menyajikan realitas, tetapi juga proses bagaimana media membangun makna sosial melalui penonjolan aspek tertentu dalam teks berita. Berdasarkan hasil analisis, Kompas.com secara konsisten menampilkan isu pertambangan dalam bingkai yang mengarah pada ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat adat. Pola pembingkaiian dilihat melalui empat elemen framing. Keempat elemen digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana media membentuk wacana, menentukan aktor penyebab masalah, memberi penilaian moral, dan mengusulkan solusi atas isu yang diberitakan.

| Judul Berita | <i>Define Problem</i> | <i>Diagnose Causes</i> | <i>Moral Judgement</i> | <i>Treatment recommendation</i> |
|---|---|--|---|--|
| <i>Raja Ampat: Surga Biodiversitas yang Diterpa Dilema Global</i> | Energi hijau yang seharusnya ramah lingkungan justru membuat ancaman bagi ekosistem. masalah utama bukan sekedar hanya izin tambang tetapi juga dilema global antara konservasi dan | Pelanggaran UU no 1/2014 memperlihatkan bahwa masalah datang dari inkonsistensi hukum, adanya izin terbit tambang yang jelas dilarang di undang-undang | Media membela posisi masyarakat adat, serta menyoroti lemahnya peran pemerintah dalam menjaga Raja Ampat dari ancaman pertambangan. | Mendorong pembangunan berbasis konservasi, masa depan Raja Ampat tidak bisa bergantung pada tambang, tetapi lebih berfokus pada ekowisata, perikanan berkelanjutan dan pengolahan produk laut sehingga |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | eksploitasi | | | kelestarian laut tetap terjaga dan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan. |
| <i>Ambil Untung Tanpa Merugikan, Cara Masyarakat Adat Raja Ampat Hidup Tanpa Tambang</i> | Kerusakan alam disebabkan oleh keegoisan manusia dan menyebabkan bencana alam yang merugikan bagi manusia itu sendiri | Industrialisasi dan kepentingan global untuk energi dan teknologi mendorong eksploitasi berlebihan, termasuk di Raja Ampat. | Masyarakat adat masih mempertahankan tradisi sasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendapatkan keuntungan ekonomi | Menghidupkan kembali kearifan lokal masyarakat adat seperti sasi dan menjadikan tradisi itu sebagai dasar kebijakan konservasi |
| <i>Polemik Tambang di Raja Ampat: Rusak Alam, Diprotes Masyarakat, dan Dalih Pemerintah</i> | Dikenal sebagai surga pariwisata justru tercoreng oleh aktivitas tambang nikel | Kerusakan ekologis adalah akibat dari praktik pertambangan bukan faktor alamiah. | Masyarakat adat yang menolak adanya aktivitas tambang, dengan alasan menjaga ekosistem dan identitas Raja Ampat yang harus dijaga kelestariannya | Pencabutan ijin ketika terbukti melanggar, menampikan langkah hukum dan keberlanjutan ekologis sebagai jawaban dari polemik tambang. |
| <i>KLH Dalam Kerusakan Lingkungan akibat Aktivitas Tambang di</i> | Kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat | Pencemaran lingkungan di Pulau manuran | Pemerintah menutup aktivitas tambang dan pemberhentian operasi | Penerapan sanksi berat bagi perusahaan tambang agar mendapatkan efek jera |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <i>Raja Ampat</i> | | | | |
| <i>Kontra-Narasi Tambang Raja Ampat dan Krisis Kepercayaan Publik</i> | Raja Ampat tak hanya dimiliki oleh Papua Barat Daya, tetapi oleh seluruh dunia. Kawasan ini menjadi simbol penting dari kekayaan hayati dan ekologi laut Indonesia yang tak ternilai. | Dominasi kepentingan ekonomi atas pelestarian alam. | Pentingnya tanggung jawab moral dalam eksploitasi sumber daya alam. | Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga lingkungan. |

Tabel 1 Elemen Framing Pemberitaan *Kompas.com* tentang Isu Pertambangan di Raja Ampat

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan pola pembingkai yang konsisten pada seluruh berita. *Kompas.com* secara dominan menghadirkan isu pertambangan sebagai ancaman terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat adat, bukan sebagai peluang ekonomi. Realitas pertambangan dibangun melalui seleksi isu yang menekankan krisis ekologis, sedimentasi, pencemaran, serta konflik sosial akibat keberadaan perusahaan tambang di pulau seperti Gag, Kawe, dan Manyafun. Media memperlihatkan bahwa kerusakan tersebut melanggar prinsip konservasi, terutama karena Raja Ampat adalah kawasan hayati laut tertinggi dan telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada 2023, Konflik terjadi karena perbedaan sudut pandang, latar belakang, pengalaman, dan kepentingan (Zulfiningrum et al., 2020). Elemen *define problems*, *Kompas.com* menggambarkan aktivitas pertambangan sebagai masalah serius yang mengancam keberlanjutan biodiversitas laut dan kelangsungan hidup masyarakat adat. Kerusakan hutan seluas lebih dari 500 hektar serta penurunan kualitas perairan menjadi bukti bahwa penambangan menciptakan krisis ekologis yang nyata. Media menunjukkan bahwa dilema lingkungan di Raja Ampat merupakan bagian dari tantangan global antara konservasi dan eksploitasi sumber daya untuk energi hijau. *Diagnose clause* (penyepap masalah) dikaitkan dengan lemahnya regulasi pemerintah, inkonsistensi penerbitan izin tambang, dan dominasi kepentingan ekonomi. Kompas menekankan bahwa beberapa izin tambang berada di zona telah dilindungi regulasi pemerintah. Media mengaitkan penyebab kerusakan dengan industri global energi dan teknologi yang menciptakan permintaan nikel secara besar-

besaran dan dalam beberapa berita, aktor yang dianggap bertanggung jawab terdiri dari perusahaan tambang, pemerintah pusat, serta lemahnya pengawasan lingkungan.

Elemen moral judgement, Kompas.com memberi penilaian moral yang berpihak pada masyarakat adat dan prinsip keadilan ekologis. Pemberitaan menonjolkan kearifan lokal seperti tradisi sasi sebagai praktik yang menjaga keseimbangan lingkungan. Media memosisikan masyarakat adat sebagai penjaga alam yang terdampak langsung oleh eksploitasi tambang. Nada pemberitaan menunjukkan kritik terhadap pemerintah yang kurang transparan dan tidak melibatkan masyarakat adat dalam penerbitan izin tambang. *Kompas.com* memosisikan pertambangan sebagai tindakan yang merusak, tidak etis, dan berlawanan dengan prinsip pelestarian warisan ekologis dunia. *Treatment recommendation*. Kompas.com merekomendasikan solusi yaitu penghentian operasi tambang, evaluasi izin yang melanggar aturan, penegakan hukum yang tegas, dan pemberian sanksi bagi perusahaan. Kompas.com menyarankan pengembangan ekonomi alternatif berbasis konservasi seperti ekowisata, perikanan berkelanjutan, serta pengolahan produk laut. Pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan kebijakan merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem Raja Ampat dan mencegah terjadinya krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Rekomendasi Kompas.com menekankan urgensi kolaborasi antara pemerintah, lembaga lingkungan, dan komunitas lokal untuk menjaga kelestarian lingkungan jangka panjang.

Kompas.com membangun narasi besar bahwa pertambangan di Raja Ampat bukan hanya persoalan eksploitasi sumber daya alam, tetapi persoalan moral, politik, dan keadilan ekologis. Media mengkonstruksi realitas bahwa aktivitas tambang di kawasan konservasi merupakan ancaman terhadap identitas ekologis Indonesia dan hak masyarakat adat. Temuan penelitian memperkuat teori konstruksi sosial Berger & Luckmann bahwa media memiliki kekuatan membentuk realitas melalui bahasa dan penekanan tertentu, serta teori agenda setting McCombs & Shaw karena *Kompas.com* berhasil menempatkan isu tambang Raja Ampat sebagai perhatian utama publik melalui intensitas dan sudut pandang pemberitaannya.

KESIMPULAN

Hasil riset memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat luas, khususnya dalam meningkatkan literasi media kritis terhadap isu-isu agraria dan lingkungan di era digital. Bagi masyarakat adat dan komunitas lokal di Raja Ampat, penelitian ini menegaskan bahwa narasi perlawanan dan kearifan lokal mereka memiliki ruang legitimasi yang kuat di media massa nasional arus utama, yang dapat digunakan sebagai modal sosial untuk mengadvokasi hak atas ruang hidup mereka. Bagi masyarakat umum, riset ini membuka kesadaran kolektif bahwa konsumsi teks berita tidak boleh diterima secara pasif, melainkan dibaca secara kritis untuk melihat kepentingan ekonomi global dan kebijakan politik dikonstruksi oleh media, sehingga masyarakat dapat lebih selektif dan objektif dalam menyikapi

narasi pembangunan ekofasistis yang mengorbankan kelestarian lingkungan demi pertumbuhan ekonomi semata. Riset merumuskan beberapa rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan. Pertama, pemerintah pusat dan daerah didesak untuk melakukan restrukturisasi kebijakan dan mengevaluasi kembali izin usaha pertambangan di pulau-pulau kecil Raja Ampat dengan memprioritaskan kepatuhan hukum terhadap UU No. 1/2014 serta wajib melibatkan masyarakat adat secara substantif sejak tahap perencanaan. Kedua, bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan dan komunitas lokal, direkomendasikan untuk terus memperkuat sinergi dengan media massa nasional guna mengeskalisasi isu-isu marginal daerah menjadi agenda nasional. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan analisis dengan melakukan studi komparatif antara media arus utama dengan media alternatif lokal atau media sosial (seperti TikTok dan X), serta menggunakan metode resepsi khalayak untuk menguji sejauh mana framing kritis yang diproduksi media ini mampu memengaruhi tindakan atau gerakan sosial nyata di tengah masyarakat.

Kompas.com meringkai pertambangan secara kritis melalui pendekatan framing Robert N. Entman. Media *Kompas.com* menonjolkan dimensi lingkungan dan sosial sebagai pusat perhatian publik melalui pilihan bahasa, sumber berita, dan arah narasi. *Kompas.com* membentuk persepsi bahwa pertambangan di wilayah konservasi bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi krisis ekologis yang mengancam keberlanjutan alam dan kehidupan masyarakat adat. Proses framing, *Kompas.com* menggunakan Keempat elemen digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana media membentuk wacana, menentukan aktor penyebab masalah, memberi penilaian moral, dan mengusulkan solusi atas isu yang diberitakan. Media mendefinisikan masalah sebagai ancaman ekologis, mengaitkan penyebab dengan lemahnya regulasi pemerintah, memberikan penilaian moral terhadap praktik tambang yang tidak berkelanjutan, serta merekomendasikan solusi berupa evaluasi izin dan pelibatan masyarakat adat. Pola tersebut memperlihatkan *Kompas.com* berperan bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengarah wacana publik yang menegaskan pentingnya keadilan ekologis.

Hasil penelitian mengonfirmasi teori konstruksi sosial atas realitas (Berger & Luckmann, 1966) yang menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan untuk menciptakan dan mempertahankan makna sosial melalui simbol dan narasi. Framing yang dibangun *Kompas.com* menunjukkan bagaimana realitas tambang dikonstruksi sebagai persoalan moral yang menuntut tanggung jawab sosial. Selain itu, temuan juga memperkuat teori agenda setting (McCombs & Shaw, 1972) yang menempatkan media sebagai aktor yang menentukan isu-isu prioritas publik. Dengan intensitas pemberitaan yang tinggi dan pemilihan sumber yang kredibel, *Kompas.com*

berhasil menempatkan isu pertambangan Raja Ampat dalam agenda kesadaran publik. sudut pandang sosial, penelitian ini memperlihatkan bahwa media massa memiliki peran strategis dalam memperjuangkan nilai keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Kompas.com berfungsi sebagai ruang advokasi yang menghubungkan masyarakat, aktivis lingkungan, dan pembuat kebijakan melalui wacana publik yang berorientasi pada pelestarian alam.

Framing berpihak pada masyarakat adat menunjukkan media berkontribusi dalam membentuk kesadaran ekologis serta menginspirasi gerakan sosial untuk menempatkan pembangunan dan konservasi lingkungan dalam posisi yang seimbang. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Kompas.com tidak hanya menjalankan fungsi jurnalistik dalam menyebarkan informasi, tetapi juga fungsi sosial dalam membangun opini publik yang reflektif terhadap isu lingkungan. Framing yang dibangun memperlihatkan orientasi media pada tanggung jawab moral dan sosial, serta menjadikan pemberitaan sebagai sarana edukasi publik tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada media lain agar dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai framing media memengaruhi konstruksi realitas lingkungan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Albab, C. U., Hidayat, M. N., & Basori, M. H. (2022). The Migration from Analog to Digital Television. *Jurnal Audience: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 238–249.
- Atong, P. (2025). Raja Ampat dalam Persimpangan: Dilema Pembangunan Berbasis Tambang dan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIPOL)*, 23(2), 363–370.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books
- Christiansen, B., Denda, A., & Christiansen, S. (2020). Potential effects of deep seabed mining on pelagic and benthopelagic biota. *Oceanography and Marine Biology: An Annual Review*, 58, 45–60.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Eriyanto, E. (2018). Analisis *Framing* Berita: Konstruksi dan Kontestasi Makna dalam Ruang Publik Media. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 1–18.
- GoodStats. (2024, 20 Juni). *10 Portal Berita Online yang Paling Sering Digunakan Warga Indonesia 2024*. GoodStats. Diperoleh dari <https://data.goodstats.id/statistic/10-portal-berita-online-yang-paling-sering-digunakan-di-indonesia-2024-CH3pu>
- Greenpeace. (2023). Greenpeace Indonesia. (2025). *Surga yang Hilang: Dampak Ekspansi Tambang Nikel terhadap Ekosistem Raja Ampat dan Masyarakat Adat*. Greenpeace Indonesia. Diperoleh

dari https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2025/06/d1b1ba8c-surga_yang_hilang_raja_ampat_laporan

- Hadi, S., Solossa, M., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), 513–522.
- JATAM. (Jaringan Advokasi Tambang). (2023). *Tambang Pulau Gag: Negara Oligarki Ekstraktif*. Diperoleh dari <https://jatam.org/id/lengkap/Tambang-Pulau-Gag-Negara-Oligarki-Ekstraktif>
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, R. (2023). Urgensi Penelitian *Framing* Media dalam Meningkatkan Literasi Kritis Mahasiswa Komunikasi. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 11(2), 201–215.
- Mustofa, I. (2024). Analisis Kerentanan Ekologis dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Kawasan Konservasi. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan*, 18(1), 12–25.
- Nugroho, W., Imamulhadi, Nugroho, B. D., & Nurlinda, I. (2018). Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 819–844.
- Sani, H., & Syamsuddin. (2025). Konflik Penambangan Nikel di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan dan Rekayasa Pertambangan untuk Konservasi Berkelanjutan. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 3453–3461.
- Siska, Utomo, L., Sara, R., & Rozikin, I. (2025). Urgensi dan Dinamika Proses Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 5(1), 20–27.
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2014). *Mediating the message in the 21st century: A media sociology perspective*. Routledge.
- Syahputra, I. (2022). Strategi pembelajaran analisis media untuk peningkatan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. *Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial*, 3(2), 170–185.
- Zulfiningrum, R., Purnawa DW, A. N., & Wahyono, E. (2020). Menuju Dialog Deliberatif Resolusi Konflik: Sebuah Studi Komunikasi Antarbudaya di Kampung Adat Jalaswatu. *Jurnal Audience: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 79–98.